



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- **1** MEI 2025



PELANTIKAN DAN
PENAGAMBILAN SUMPAAH PPNS



DESK EVALUASI
PEMBANGUNAN ZI



PERTEMUAN
MENTERI HUKUM RI

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Apel Pagi Kemenkum Kalsel: Jaga Integritas, Mantapkan Langkah Menuju WBK



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap Senin pagi (5/5). Apel ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, para Pejabat Manajerial, Pejabat Non Manajerial, serta seluruh pegawai Kantor Wilayah.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, menyampaikan beberapa arahan penting. Salah satunya terkait pelaksanaan kegiatan Entry Meeting menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar secara virtual pada hari ini dan diikuti oleh seluruh tim kerja. Ia juga menekankan bahwa mulai besok, tim WBK akan melakukan proses desk evaluasi terhadap Kanwil Kalsel sebagai bagian dari tahapan pembangunan Zona Integritas.

Selain itu, Dewi juga menginformasikan bahwa akan dilaksanakan sosialisasi terkait pendataan pegawai, hingga Pelantikan PPNS yang merupakan bentuk pelayanan dari Bidang AHU.

Dalam arahnya, Pembina Apel juga mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Apel pagi ditutup dengan semangat untuk mengawali pekan kerja dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.





Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Perbup Tanah Laut



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan kembali menggelar Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) dari Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (05/01) ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dan bertempat di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel. Rapat harmonisasi kali ini membahas dua rancangan penting, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kintap dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bajuin.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah diterima sebelumnya. Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, serta dua orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam arahannya, Anton Edward Wardhana menegaskan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai HAM.

“Tim perancang Perundang-Undangan akan melakukan harmonisasi berdasarkan prinsip penyusunan Perundang-undangan,” ungkap Anton.

Dalam pembahasan tersebut, diketahui bahwa tujuan penataan untuk mewujudkan Bajuin sebagai kawasan penyangga pariwisata dan Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan mengedepankan sinergitas sektor pertanian dan industri serta memperhatikan prinsip berketahanan dan berkelanjutan. Selanjutnya juga dibahas bahwa tujuan wilayah perencanaan Kintap sebagai sebagai pintu gerbang Tanah Laut dengan fungsi ekonomi regional berbasis perdagangan dan jasa didukung pengembangan sarana prasarana perkotaan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan konstruktif, dengan diskusi teknis antara tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel dan perangkat daerah dari Kabupaten Tanah Laut.

Kemenkum Kalsel Lantik Dua PPNS dari Kabupaten Tanah Laut dan Balangan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Balangan, Senin (5/5).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, di hadapan saksi, rohaniwan, pejabat manajerial, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Nuryanti Widyastuti menjelaskan bahwa PPNS merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Ia menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Keberadaan PPNS merupakan bentuk nyata sinergi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum di bidang-bidang khusus yang tidak ditangani penyidik kepolisian secara umum,” ujar Nuryanti.

Ia juga menekankan bahwa PPNS memiliki peran penting dan strategis sebagai aparat penegak hukum non-Polri, khususnya dalam menjaga ketertiban hukum sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing.

“Momentum pelantikan hari ini tentu menjadi titik awal bagi Saudara/i untuk menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Jabatan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil dan profesional bagi masyarakat dan negara,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, dua PPNS yang resmi dilantik yaitu Rachel Hasiholan Simanjuntak, sebagai PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dan Noor Aspariah, sebagai PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Balangan.

Menutup sambutannya, Kakanwil mengucapkan selamat kepada para PPNS yang baru saja dilantik dan berharap mereka dapat mengemban tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, dan integritas.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Entry Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Entry Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 secara virtual pada Senin (03/03) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mematangkan mekanisme evaluasi pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum sebagai langkah awal menuju predikat WBK dan WBBM.

Turut hadir secara virtual dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari serta seluruh tim kerja pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam sambutannya, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Nanih Kusnani, menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini akan dilakukan secara menyeluruh melalui metode daring dan luring.

“Evaluasi akan dilaksanakan melalui desk evaluation dan evaluasi lapangan, serta dilakukan sampling terhadap satuan kerja untuk melihat pelayanan publik. Untuk tahun ini, kita akan mengambil Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai salah satu satker yang menjadi sampling,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menghadapi proses evaluasi pembangunan ZI.

“Kanwil Kemenkum Kalsel siap menjalani seluruh tahapan evaluasi pembangunan ZI. Kami telah melakukan berbagai langkah perbaikan layanan dan penguatan integritas, serta terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara para peserta dengan tim Inspektorat Jenderal, yang membahas berbagai aspek teknis evaluasi serta kesiapan masing-masing satuan kerja dalam menghadapi proses penilaian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran satuan kerja dapat lebih memahami standar evaluasi serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum.

Perkuat Kualitas Regulasi Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Ranperbup HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah. Selasa (06/05) agenda harmonisasi digelar untuk menyempurnakan dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 188.342/345/KUM/2025 dan Nomor: 188.342/344/KUM/2025 tertanggal 17 April 2025 perihal permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten HST. Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiv P3H, Anton Edward Wardhana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardiah, serta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten HST turut hadir Kepala Bappelitbanda, Muhiddin, dan Kepala Bagian Hukum Setda HST, Taufik Rahman.

Dalam sambutannya, Anton Edward Wardhana menekankan pentingnya harmonisasi sebagai upaya penyelarasan substansi rancangan peraturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten HST dalam memastikan seluruh produk hukum daerah dibentuk secara terstruktur, sistematis, dan taat asas. Harmonisasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bentuk penguatan kualitas regulasi daerah,” ujar Anton.

Sementara itu, Perancang Ahli Madya Bahjatul Mardiah menambahkan bahwa proses harmonisasi ini juga menjadi ruang untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen hukum daerah, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Pihak Pemkab HST melalui Kepala Bappelitbanda Muhiddin menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia berharap agar produk hukum hasil harmonisasi ini dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif dan berdaya guna.

“Kami berharap setelah harmonisasi ini, Ranperbup yang disusun bisa segera ditetapkan dan menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerjanya tahun 2026,” ungkap Muhiddin.

Rapat berlangsung secara dinamis dengan pembahasan teknis substansi dan perbaikan redaksional terhadap kedua Ranperbup. Proses harmonisasi ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rakor Virtual Optimalisasi Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia



Banjarmasin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Virtual bertajuk Optimalisasi Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris yang dilaksanakan pada Selasa (6/5). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, JFU Bidang Pelayanan AHU di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah melalui virtual serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah secara terpisah.

Rapat dibuka dengan sambutan dari Direktur Perdata, Henry Sulaiman, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata perlindungan hukum bagi para pihak. "Notaris wajib memastikan akta yang dibuat telah terdaftar secara sah dan akuntabel," sebutnya.

Ia juga menegaskan perlunya langkah konkret seperti uji petik terhadap akta-akta fidusia guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Kantor Wilayah diminta segera mengambil langkah strategis, termasuk pengecekan dan konfirmasi data fidusia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna menjamin validitas pelaporan melalui sistem AHU Online. Arahan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Hantor Situmorang yang menekankan pentingnya koordinasi dan administrasi pendaftaran fidusia dalam mendukung program strategis nasional.

"Koordinasi dalam pendaftaran fidusia adalah bagian dari upaya mendukung agenda strategis nasional. Tanpa pendaftaran, kreditor bisa kehilangan hak hukum atas jaminannya," ujarnya, sembari merujuk pada kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam rapat, juga disoroti beberapa temuan di lapangan, antara lain belum dilaporkannya akta fidusia oleh notaris ke MPD serta tidak tercatatnya akta tersebut dalam sistem AHU. Kantor Wilayah pun diminta memperkuat peran pengawasan dan pembinaan.

"Kantor Wilayah Kementerian Hukum harus menjadi garda terdepan dalam mendorong kepatuhan notaris dan menjamin kualitas layanan fidusia yang akuntabel dan berintegritas," lanjut Ses Ditjen AHU.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, memaparkan capaian dan tantangan di wilayahnya. Ia mengungkap rendahnya tingkat kepatuhan notaris dalam pelaporan akta fidusia dan perlunya sistem pelaporan digital yang terintegrasi.

"Peningkatan kepatuhan notaris harus didorong melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan yang kuat, dan sistem pelaporan digital yang terintegrasi," sebut Asep Sutandar.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, membahas berbagai persoalan teknis dan implementatif seputar pendaftaran jaminan fidusia. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan hukum yang responsif dan terpercaya, khususnya dalam aspek perlindungan hukum melalui jaminan fidusia.

Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Pengisian Data Jabatan Manajerial dan Pelaksana



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan sosialisasi pengisian data dan informasi jabatan manajerial serta jabatan pelaksana, pada Selasa (06/05/2025).

Bertempat di Ruang Pertemuan BerAkhlak, sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Eko Herdianto selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan diikuti perwakilan jabatan pelaksana kantor wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi No. SEK.1-OT.02.03-180 tanggal 28 April 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan data jabatan manajerial sebagai pemangku tugas dan fungsi unit organisasi, sekaligus menyesuaikan informasi jabatan agar sesuai dengan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh setiap pemangku jabatan. Hal ini penting karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara jabatan dengan informasi tugasnya.

Selain itu, penyusunan data jabatan pelaksana juga dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024, dengan target pemutakhiran nomenklatur jabatan. Seluruh data dikumpulkan dalam format Excel dan wajib diserahkan ke Tim Kerja Pengelolaan SDM Kanwil Kemenkum Kalsel.



Kakanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Terima Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM



Banjarbaru, Humas_Info — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kedatangan Tim Evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (6/5) pagi di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah.

Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkum RI yang hadir dalam evaluasi ini terdiri atas Nanih Kusnani, Auditor Madya selaku Pengendali Teknis, didampingi Abdul Hamid dan Asih Retno Sayekti selaku Auditor Muda, serta Abdul Rokhman dan Tutut Asmorowati selaku Auditor Pertama.

Tim ini dijadwalkan untuk melaksanakan desk evaluasi bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) WBK Kanwil Kemenkum Kalsel.

Menyambut kedatangan tim TPI, Kepala Kantor Wilayah turut didampingi oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Bagian Umum, Rustam Sakka, serta Sekretaris Tim Pokja WBK, Eko Sulistiyono.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim TPI dan menegaskan kesiapan jajarannya dalam menghadapi proses evaluasi.

"Kami menyambut dengan terbuka dan siap mengikuti proses evaluasi ini secara maksimal. Tiga hari ke depan akan kami manfaatkan untuk menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh jajaran dalam membangun Zona Integritas menuju WBK. Evaluasi ini bukan hanya sebagai proses administratif, tetapi juga bentuk penguatan budaya kerja yang berintegritas," ujar Nuryanti.

Menanggapi hal tersebut, Nanih Kusnani selaku Pengendali Teknis menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang hangat dan kesiapan awal Kanwil Kemenkum Kalsel dalam melaksanakan proses evaluasi.

"Kami hadir bukan semata untuk menilai, namun juga untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan zona integritas benar-benar berjalan dan terinternalisasi. Harapan kami, proses desk evaluasi ini dapat berlangsung objektif dan konstruktif demi mendorong Kanwil Kemenkum Kalsel meraih predikat WBK dengan landasan kerja yang kuat dan konsisten," terang Nanih.

Proses evaluasi ini merupakan bagian penting dari komitmen Kementerian Hukum dalam mengakselerasi reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja.

Tingkatkan Kompetensi, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Teknis Indikasi Geografis dari BPSDM



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) mengikuti Pelatihan Teknis Indikasi Geografis yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum pada Senin, 5 Mei 2025. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan diikuti oleh peserta dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di 33 provinsi se-Indonesia. Dari Kanwil Kalimantan Selatan, pelatihan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, bersama JFT Pelayanan KI, Aji Rifani.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis para peserta terkait penyusunan dokumen Indikasi Geografis (IG), standarisasi mutu produk, serta prosedur pengajuan pendaftaran IG ke Direktorat Jenderal KI.

Materi pelatihan mencakup pemahaman mengenai pengertian dan manfaat IG sebagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip penyusunan dokumen deskripsi IG yang memuat karakteristik produk, wilayah, serta metode produksi, hingga tata cara penetapan logo IG yang mencerminkan ciri khas produk daerah asal.

Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang metode identifikasi keunikan produk IG dibandingkan produk sejenis dari wilayah lain, pentingnya standar mutu dan teknik klasifikasi produk berdasarkan parameter mutu, serta proses pengumpulan data valid dan sumber sah dalam penyusunan dokumen IG. Materi juga mencakup penyusunan batas kawasan IG dengan titik koordinat yang jelas serta pembuatan peta kawasan IG yang menggambarkan wilayah produksi, pengolahan, dan distribusi.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta, khususnya dari Kanwil Kalimantan Selatan, dapat semakin optimal dalam memfasilitasi proses pendaftaran IG di wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendorong lebih banyak produk lokal Kalimantan Selatan agar memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan resmi di tingkat nasional maupun internasional.



Koordinasi Lanjutan MoU, DPRD Tapin Sambangi Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, PPPH_Info — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin mengutus perwakilannya yaitu Dedy Agus Pratama, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, dan Bintari Widyaputri Utami, sebagai Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan untuk berkoordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, pada Selasa (07/05/2025).

Kedua perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dimaksud menghadap langsung Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dengan didampingi Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Tujuan kedatangan perwakilan salah satu mitra kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ini adalah untuk membicarakan tindak lanjut MoU antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang mengatur cakupan kerja sama dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum lainnya.

Lebih konkretnya, dibahas juga rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai turunan dari MoU tersebut, berkenaan dengan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

Selain itu, berkenaan dengan salah satu fungsi pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yakni pelayanan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah, Anton Edward Wardhana, terus mendorong kepada lembaga pembentuk produk hukum daerah, khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin untuk mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah inisiatifnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang mana pada catatan administrasi permohonan masih berjumlah nihil pada Tahun 2025 ini.





Kemenkum Kalsel Ikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, (07/05/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah.

Desk evaluasi ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses meraih predikat WBK, sekaligus menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Hadir sebagai Tim Penilai Internal antara lain Nanih Kusnani selaku Auditor Madya dan Pengendali Teknis, Abdul Hamid (Auditor Muda), Abdul Rokhman (Auditor Pertama), dan Tutut Asmorowati (Auditor Pertama).

Sementara itu, dari pihak Kanwil, kegiatan ini langsung diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Ketua Pembangunan ZI, para Pimpinan Tinggi Pratama selaku Ketua Pokja, Ketua Tim Humas selaku Sekretaris ZI, serta jajaran Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum.

Dalam sambutannya, Nanih Kusnani menegaskan bahwa fokus penilaian internal kali ini adalah pada aspek pelayanan publik di lingkungan Kanwil. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Zona Integritas, yakni mendorong instansi pemerintah memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

Rangkaian kegiatan evaluasi diawali dengan sambutan dari Tim Penilai Internal, dilanjutkan dengan yel-yel semangat dari Kemenkum Kalsel, pemutaran video capaian Pembangunan ZI, serta pemaparan materi WBK oleh Kepala Kantor Wilayah. Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab yang interaktif, di mana Tim Penilai memberikan berbagai saran dan masukan konstruktif guna memperkuat kualitas implementasi Zona Integritas.

Penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan prima. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, baik, dan lancar.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gencarkan Layanan Kekayaan Intelektual Lewat Rapat Strategis Agenda Kerja Bulan Mei



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan kekayaan intelektual (KI) di daerah. Hal ini tercermin dalam rapat strategis bidang Pelayanan KI yang digelar pada awal Mei, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi.

Rapat ini menjadi momentum bagi seluruh Tim Layanan KI untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat perlindungan karya cipta lokal sekaligus menyelaraskan agenda kerja bulan Mei. Tujuannya tidak lain adalah mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Selatan.

Agenda pertama yang dibahas adalah persiapan kunjungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI yang akan berlangsung pada 14–16 Mei 2025. Tim merancang sejumlah kegiatan, antara lain sosialisasi hukum, penertiban barang bajakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.

Selanjutnya, Tim Layanan KI membahas rencana keikutsertaan sebagai narasumber dalam kegiatan Bappedalitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam kegiatan tersebut, akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait permohonan hak cipta, desain industri, dan kekayaan intelektual komunal. Para ahli akan membekali pelaku UMKM dan komunitas budaya dengan pengetahuan praktis agar mereka mampu mendaftarkan dan melindungi karya-karyanya secara mandiri. Langkah ini diyakini akan mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa setiap inovasi dan warisan budaya memiliki nilai ekonomi sekaligus perlindungan hukum.

Mengakhiri rapat, Riswandi juga memaparkan rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Tapin. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan kekayaan intelektual ke daerah, mempercepat proses pendaftaran, serta menyediakan program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui berbagai langkah strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk menjadi garda terdepan dalam perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi kreatif di Banua.

Tim Itjen Lakukan Evaluasi Lapangan, Kanwil Kemenkum Kalsel Sempurnakan Pembangunan ZI menuju WBK



Banjarmasin, Humas_Info – Selasa (07/05), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rangka Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Desk Evaluasi yang sebelumnya telah dilaksanakan, sebagai bagian dari tahapan penilaian satuan kerja dalam upaya meraih predikat WBK/WBBM tahun 2025. Evaluasi Lapangan digelar secara langsung di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel dengan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Sementara itu, Tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal terdiri atas Nanih Kusnani selaku Pengendali Teknis, Abdul Hamid sebagai Ketua Tim, serta Abdul Rokhman dan Tutut Asmorowati sebagai anggota tim.

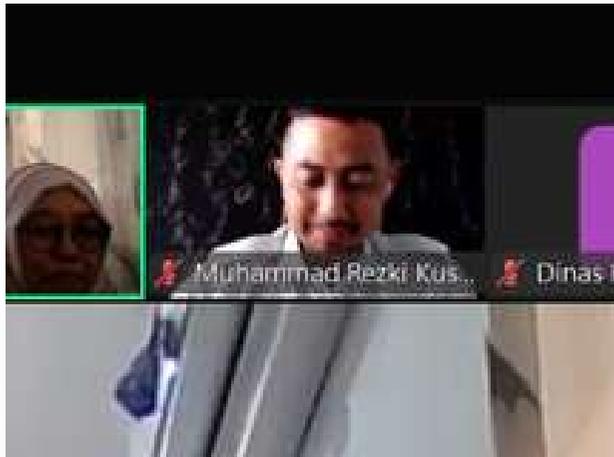
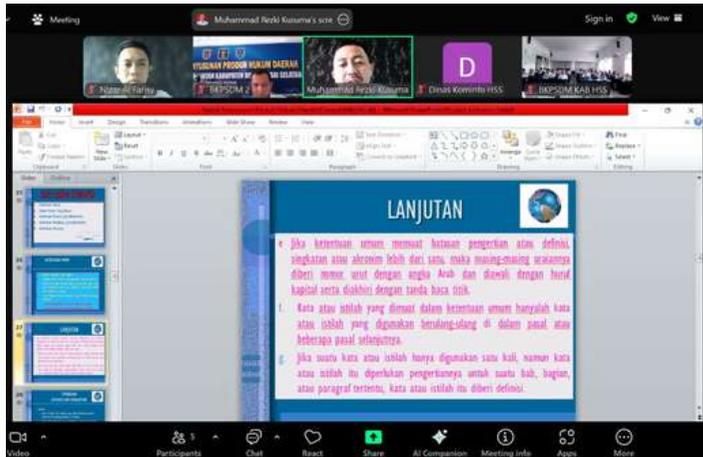
Dalam evaluasi lapangan ini, Tim Itjen melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, ruang pelayanan publik, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Fokus utama adalah memastikan bahwa seluruh indikator pembangunan Zona Integritas telah diterapkan secara konsisten dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, dalam menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara nyata dan berkelanjutan.

“Evaluasi Lapangan ini momen penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami siap menindaklanjuti segala masukan sebagai bentuk komitmen kami menuju predikat WBK,” ujar Nuryanti.

Melalui tahapan evaluasi ini, diharapkan Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel dapat semakin memperkuat integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan melayani.



Sinergi Penguatan Regulasi Daerah: Kemenkum Kassel Isi Materi dalam Diklat Produk Hukum Pemkab HSS



Banjarmasin, PPPH_Info - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan penting dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selama 4 (empat) hari berturut-turut peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan produk hukum daerah, yang dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2025, bertempat di Gedung II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal turut diundang untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud, seperti Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sampai dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Secara virtual melalui platform zoom meeting, Muhammad Rezki Kusuma dan Nizar Al Farisy, yang masing-masing selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menyampaikan beberapa materi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang terjadwal untuk mengisi materi pada hari Rabu (07/05).

Dimulai dari Muhammad Rezki Kusuma, terlebih dahulu memaparkan secara umum terkait dengan pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, seperti fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah; sampai dengan pelaksanaan harmonisasi, baik itu Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Secara lebih teknis, disampaikan materi terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk aturan-aturan yang termutakhir, sebagai contoh adanya pembaruan implementasi ketentuan pidana pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 nanti, sehingga daerah mengerti bagaimana metode penyusunan materi muatan ketentuan pidana yang berkesesuaian dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Pada kesempatan selanjutnya, Nizar Al Farisy, memberikan materi terkait ragam bahasa peraturan perundang-undangan, yang dinilai cukup penting juga karena di daerah jenis instrumen hukumnya tidak hanya tercakup Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah saja, namun ada juga berbentuk penetapan/keputusan yang notabene harus menyesuaikan secara leksikal (pemilihan diksi dan ejaan) sampai dengan aspek gramatikal (tata bahasa/struktur norma yang berkaidah), sehingga dipandang perlu patut dipahami dan dikuasai juga para penyusun produk hukum daerah.

Beranjak pada sesi diskusi, peserta secara aktif melontarkan beberapa pertanyaan sebagai gambaran tingginya rasa antusiasme terhadap materi yang telah disampaikan, mengingat pada momentum ini digadang akan menjadi bekal dan kesiapan para sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun berbagai instrumen hukum di daerah.

Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Fasilitasi Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Banjar



Banjarmasin, Humas_info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda, Rabu (07/05)).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 100.3/197/KUM/2025 tanggal 17 April 2025 perihal permohonan harmonisasi Ranperda dimaksud. Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana dan diikuti oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Banjar turut hadir dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Dalam rapat ini, dibahas muatan substansi Ranperda yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai upaya mendukung peningkatan kapasitas permodalan bank daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar.

Kepala Divisi P3H Anton Edward Wardhana menyampaikan pentingnya penyusunan Ranperda dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyertaan modal daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat, dan harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian norma serta menghindari potensi disharmoni dalam pelaksanaannya,” ujar Anton.

Rapat berlangsung dengan berbagai masukan dari tim perancang sebagai penyempurnaan Ranperda yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kunjungan Bank Mandiri ke Kemenkum Kalsel, Wujudkan Kolaborasi Layanan Keuangan yang Optimal



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari jajaran Cabang Bank Mandiri Pangeran Samudera, Kamis (8/5). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah ini diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, didampingi Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Eko Herdianto.

Kepala Cabang Bank Mandiri Pangeran Samudera, Delni Sepriyanti, hadir bersama jajaran yaitu Branch Sales Manager, Aan; Government Business Manager, Fitri; dan Government Business Officer, Made.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi kerja sama strategis antara Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri, khususnya dalam mendukung operasional serta pengelolaan anggaran secara optimal di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

"Sinergi yang baik dengan mitra strategis seperti Mandiri sangat penting dalam menunjang berbagai aspek operasional, terutama dalam pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan transparan," ujar Nuryanti Widyastuti.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Bank Mandiri Pangeran Samudera, Delni Sepriyanti, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung penuh penguatan layanan keuangan yang selaras dengan kebutuhan instansi pemerintah.

"Kami siap mendukung Kemenkum Kalsel melalui berbagai solusi keuangan yang inovatif dan layanan perbankan yang terintegrasi, demi terciptanya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran," ungkap Delni.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri sebagai mitra strategis. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, mencerminkan hubungan kerja sama yang harmonis. Diharapkan, sinergi ini terus berlanjut guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai program kerja Kemenkum Kalsel.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Penanaman Modal untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Daya Saing Daerah



Banjarmasin, Humas_info – Dalam rangka memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan harmonisasi yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal pada Kamis (08/05/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan asas dan norma peraturan perundang-undangan.

Kegiatan harmonisasi ini dihadiri oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah bersama dengan perangkat daerah terkait serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemrakarsa. Pembahasan difokuskan pada substansi materi muatan dalam Raperda yang mengatur prinsip, kewajiban, hak, hingga pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menekankan pentingnya harmonisasi sebagai upaya menjamin keselarasan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Dengan adanya harmonisasi ini, kita ingin memastikan bahwa Raperda tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen yang strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan investasi di daerah,” ungkapnya.

Raperda ini disusun sebagai pengganti Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penanaman Modal yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelaku usaha saat ini. Dalam rancangan terbaru, diatur berbagai bentuk insentif dan kemudahan, mulai dari pengurangan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan perizinan, hingga kemudahan akses terhadap informasi peluang investasi.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif, berkeadilan, dan mampu memberikan perlindungan serta kemudahan bagi investor, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Langkah Besar Menuju Pengakuan Nasional: Kemenkum Kalsel dan Bappelitbangda HSS Bahas IG Kayu Manis Loksado



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), M. Afif Bizri, bersama tim, dalam rangka mempererat sinergi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, beserta jajaran Tim Layanan KI Kanwil.

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tindak lanjut perpanjangan Nota Kesepahaman antara Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten HSS, serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama baru dengan Bappelitbangda HSS. Kedua pihak berkomitmen memperkuat dukungan administratif dan teknis guna memperlancar layanan KI, khususnya bagi pelaku usaha dan komunitas budaya lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Riswandi menegaskan bahwa kesinambungan kerja sama ini akan mempercepat akses masyarakat terhadap pendaftaran hak cipta, desain industri, serta indikasi geografis. “Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk mendorong potensi kekayaan intelektual daerah agar semakin diakui dan dilindungi secara hukum,” ujarnya.

Salah satu fokus utama diskusi adalah rencana pemeriksaan substantif terhadap Indikasi Geografis (IG) “Kayu Manis Loksado”. Tim dari Bappelitbangda HSS bersama Tim Pelayanan KI Kanwil akan menyusun pedoman teknis, menghimpun data agronomi, mendokumentasikan praktik budidaya dan panen, serta menyiapkan dokumen pendukung untuk proses audit lapangan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan resmi IG Kayu Manis Loksado oleh pemerintah pusat.

Pertemuan ditutup dengan penetapan garis waktu kegiatan dan pembentukan tim kerja bersama. M. Afif Bizri menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat serta kemitraan strategis yang telah terjalin. Ia optimistis bahwa kerja sama ini tidak hanya melestarikan warisan budaya lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Banua.

Langkah konkret selanjutnya akan diumumkan dalam waktu dekat, sebagai bentuk komitmen kuat Kemenkum Kalsel dan Pemkab HSS dalam memajukan perlindungan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor, Ed: Joel/Eko).





Exit Meeting Pembangunan ZI: Kemenkum Kalsel Dapatkan Rekomendasi TPI, Optimis Raih Predikat WBK Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Exit Meeting Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Jumat(9/05/25). Kegiatan ini menjadi evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan pembangunan ZI yang telah dilakukan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Exit meeting ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta seluruh Tim Kelompok Kerja Pembangunan ZI Kanwil Kalsel. Dari pihak Itjen hadir Nanih Kusnani selaku Pengendali Teknis bersama Abdul Hamid, Abdul Rokhman, dan Tutut Asmorowati sebagai Tim Penilai Internal.

Selaku Moderator, Anton Edward yang juga Ketua Tim Pembangunan ZI mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim penilai internal dan atas dipilihnya Kanwil Kalsel sebagai lokasi evaluasi lapangan secara langsung. Sementara itu, Nanih Kusnani menyampaikan apresiasi atas semangat pegawai Kanwil Kalsel dalam membangun Zona Integritas. Ia menyatakan bahwa berdasarkan hasil desk evaluasi maupun tinjauan lapangan, Kanwil Kalsel telah memenuhi nilai minimal untuk diusulkan ke tahap penilaian panel nasional, disertai beberapa catatan untuk penyempurnaan pada masing-masing pokja.

Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik hasil penilaian dan menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki data dukung yang masih kurang. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi dalam membangun ZI agar tahun ini Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meraih predikat WBK.

“Mari Segera kita tindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Tim Penilai Internal, dan kita terus berproses untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi dalam membangun ZI di Kanwil Kemenkum Kalsel,” ucapnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan Berita Acara dari tim penilai internal kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai tanda berakhirnya proses evaluasi tahap internal.



Temui Menteri dari Malaysia, Supratman Bahas Pembangunan Hukum di ASEAN



Jakarta - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said, Kamis (8/5/2025).

Kedua menteri negara tetangga ini membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional. Supratman mengatakan Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir perkembangan terkini.

“Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing,” ujar Supratman dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menteri Hukum itu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Supratman, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. ALF ini sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

“Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan Pernyataan Bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia,” katanya.

Selain arbitrase, kedua menteri juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Posisi geografis Indonesia-Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara. Kementerian Hukum mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

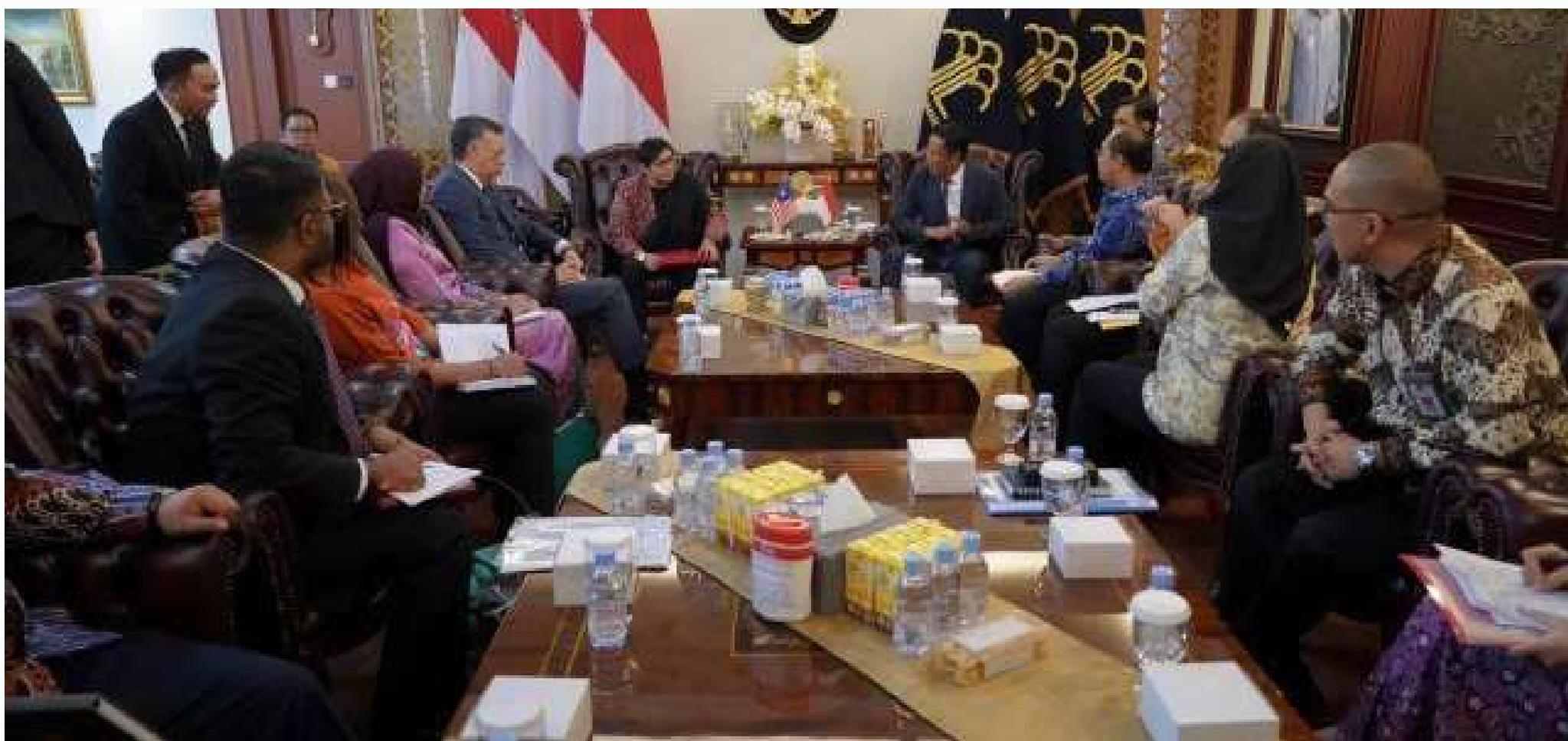
Supratman menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami mendorong Malaysia untuk bergabung dalam Konvensi Apostille mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di mana warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis,” tutur menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Sementara itu, Dato' Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum dapat berkembang semakin baik ke depannya. Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung penuh inisiatif Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam memperkuat kerja sama hukum di kawasan ASEAN, khususnya melalui pembahasan topik arbitrase dan mediasi komersial internasional bersama Menteri dari Malaysia.

"Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong harmonisasi hukum dan penguatan alternatif penyelesaian sengketa lintas negara. Sebagai bagian dari jajaran Kementerian Hukum, kami di wilayah siap mendukung kebijakan pusat dengan memastikan pemahaman dan implementasi regulasi yang selaras, termasuk dalam hal pelayanan hukum seperti apostille yang sangat relevan bagi warga Kalimantan Selatan yang memiliki hubungan langsung dengan Malaysia," ucapnya.



Sinergi Erat: Rapat Intensif Kemenkum Kalsel dan Pemkab Kotabaru Genjot Penyempurnaan Finalisasi Dokumen IG Gula Aren Tirawan



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rapat pendampingan penyempurnaan dokumen Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan. Dipimpin Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan KI, pertemuan ini juga dihadiri jajaran fungsional Pelayanan KI, perwakilan Bapperida Kotabaru, Helpdesk KI, serta tim ahli lintas disiplin, Jumat (09/05/2025).

Diskusi hangat membuka opsi penamaan resmi: apakah cukup “Gula Aren Tirawan” untuk branding yang ringkas, atau ditambah label “Kotabaru” untuk menegaskan asal wilayah. Keputusan akhir dijadwalkan pekan depan, agar proses publikasi IG bisa segera dilanjutkan.

Kelancaran proses IG menjadi fokus utama saat peserta sepakat segera melengkapi seluruh persyaratan teknis seperti SK MPIG, peta geografi lahan, hingga hasil uji tanah. Tim juga merekomendasikan penggunaan rentang harga untuk penetapan nilai jual, memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha menyesuaikan harga sesuai kualitas dan kuantitas produksi.

Menjelang pemeriksaan dokumentasi oleh tim ahli DJKI pada 19 Mei 2025, pihak-pihak terkait menetapkan tenggat revisi dokumen terkoreksi sebelum tanggal tersebut. Dengan sinergi erat antara Kemenkumham Kalsel, Bapperida Kotabaru, dan tim ahli, Gula Aren Tirawan kian siap meraih pengakuan IG dan menembus pasar nasional maupun internasional.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)